

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN JENEPONTO**

(Survai di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto)

***COMMUNITY ROLE IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST
IN JENEPONTO REGENCY***

(A Survey in Kapita Village, Bangkala District of Jeneponto Regency)

MUHAMMAD NUR NONCI

P01 082 05 505



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009**

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN JENEPONTO**

(Survai di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto)

***COMMUNITY ROLE IN THE DEVELOPMENT OF COMMUNITY FOREST
IN JENEPONTO REGENCY***

(A Survey in Kapita Village, Bangkala District of Jeneponto Regency)

Program Studi Sistem-Sistem Pertanian
Konsentrasi Perencanaan dan Kebijakan Pembangunan Pertanian

Oleh:

MUHAMMAD NUR NONCI

P01 082 05 505



PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2009
TESIS

**PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN
HUTAN KEMASYARAKATAN DI KABUPATEN JENEPONTO**

Disusun dan diajukan oleh:

MUHAMMAD NUR NONCI

No. Pokok P01 082 05 505

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 31 Maret 2009

dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui:

Komisi Penasihat

Ketua,

Anggota,

Prof. Dr. Ir. Samuel A. Paembonan, M.Sc

Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec

Ketua Program Studi
Sistem–Sistem Pertanian

Direktur Program Pascasarjana
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Ir. Syamsuddin Garantjang, M.Agr Prof. Dr. dr. A. Razak Thaha, M.Sc

PRAKATA

Syukur dan puji dipanjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkah dan hidayah yang diberikan sehingga dapat diselesaikan penyusunan tesis ini.

Penelitian yang dilakukan terhadap peran serta masyarakat dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto didasarkan atas pertimbangan bahwa dari inventarisasi lapangan yang dilakukan, diketahui salah satu faktor yang menyebabkan sehingga pembangunan HKM di Desa Kapita kurang berhasil

mewujudkan kelestarian HKm dan peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat adalah karena rendahnya peran serta masyarakat didalam pembangunan HKm tersebut. Faktor ini mendorong untuk meneliti sebab dan upaya yang harus dilakukan agar dapat meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan HKm di Desa Kapita Kecamatan Bangkala.

Penyusunan tesis ini adalah salah satu persyaratan untuk mencapai gelar magister Program Studi Sistem – Sistem Pertanian pada Universitas Hasanuddin Makassar. Dalam penyusunannya telah diterima bantuan yang tidak terhingga dari berbagai pihak, oleh karena itu terima kasih yang sebesar – besarnya dihaturkan kepada Prof. Dr. Ir. Samuel A. Paembonan, M.Sc dan Dr. Ir. Muslim Salam, M.Ec sebagai ketua dan anggota Komisi Penasehat yang dengan sungguh – sungguh telah mengarahkan, mengoreksi dan memberi masukan sejak disusun hingga selesai tesis ini.

Ucapan terima kasih disampaikan pula kepada Bapak Prof.Dr.Ir.A.Rahman Mappangadja, MS, Prof. Dr. Ir. Didi Rukmana, MS dan

Ibu Dr. Ir. Rahmawaty A. Nadja, MS, segenap dosen dan karyawan Pascasarjana Universitas Hasanuddin, untuk dedikasinya selama penulis menempuh perkuliahan.

Kepada Kepala Dinas Kehutanan, Perkebunan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Jeneponto beserta staf yang telah memberi izin dan bantuan untuk yang mendampingi, memberi masukan serta menuntun selama diadakan penelitian juga diucapkan terima kasih yang sebesar – besarnya.

Akhirnya, kepada isteri dan anak – anak tercinta yang telah memberi motivasi dan dorongan yang tidak henti – hentinya sehingga dapat diselesaikan penyusunan tesis ini.

Tak lupa kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi masukan selama penyusunan tesis ini , juga diucapkan terima kasih.

Makassar, Maret 2009

Muhammad Nur Nonci

iv

ABSTRAK

MUHAMMAD NUR NONCI, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto; Survei di Desa Kapita Kecamatan Bangkala* (dibimbing oleh Samuel A. Paembonan dan Muslim Salam).

Penelitian ini bertujuan mengetahui bentuk peran serta masyarakat dalam pembangunan hutan kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto; dan mengetahui masalah yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan hutan kemasyarakatan.

Populasi penelitian sebanyak 239 orang. Sampel dipilih secara acak sebanyak 60 orang di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, sebagai lokasi *pilot project* pembangunan hutan kemasyarakatan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan angket. Data dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran serta masyarakat dalam pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala

masih rendah, khususnya keterlibatan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan dan pengawasan sehingga pembangunan Hutan Kemasyarakatan belum mampu mewujudkan pelestarian hutan dan kurang mendukung peningkatan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang berdiam di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, pembangunan hutan kemasyarakatan masih bersifat *top down planning*, belum menempatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pelaku utama dalam pengelolaannya.

v

ABSTRACT

MUHAMMAD NUR NONCI. *Community Role in the Development of Community Forest in Jeneponto Regency : A Survey in Kapita Village of Bangkala District* (supervised by Samuel A. Paembonan and Muslim Salam)

This research aims to find out the form of community role in the development of Community Forest in Jeneponto Regency and the problems faced by community in the development of Community Role. The strategy of

continuity Community Forest used collaborative management, ecologic function stability of management right and the strengthening of farmer groups of Community Forest in Jeneponto Regency.

This research was a descriptive study conducted in Kapita Village, Bangkala District of Jeneponto Regency as one of the locations of pilot project of the development of Community Forest. The sample consisted of 60 farmers selected using simple random sampling technique out of 239 respondents as population. The data were obtained through survey interview, observation, and questionnaire. The respondents consisted of three community figures, four government officials, fourteen developed farmers, and forty common farmers.

The results show that the role of community in the development of Community Forest in Kapita Village, Bangkala District is still low especially their participation in planning, implementation, utility, and control. Therefore, the development of Community Forest has not put into realization the social economic condition of community who live around the forest area. This indicates that development of Community Forest is still a top down planning and it has not put the community around the forest as the main actor in forest management.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PRAKATA	iii
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Masalah Penelitian.....	8

C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pembangunan Kehutanan.....	10
B. Hutan Kemasyarakatan.....	12
C. Konsep Keterlibatan.....	19
	vii
D. Problematika yang Dihadapi Masyarakat untuk Berperan Serta dalam Pengelolaan HutanKemasyarakatan.....	40
E. Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang Berkelanjutan.....	44
F. Kerangka Pikir.....	46
G. Hipotesis.....	51
III. METODE PENELITIAN.....	52

A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	52
B. Teknik Pengambilan Sampel.....	52
C. Teknik Pengambilan Data.....	53
D. Teknik Analisis Data.....	54
E. Definisi Operasional.....	54
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	58
A. Keadaan Umum Daerah Penelitian.....	58
B. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.....	62
C. Problematika Untuk Berperan Serta dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan.....	78
D. Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan	84
V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	102
A. Kesimpulan.....	102
B. Saran.....	104
DAFTAR PUSTAKA.....	106

PETA LOKASI PENELITIAN.....	109
-----------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Nomor	Halaman
1. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Kabupaten Jeneponto.....	7
2. Luas Desa / Kelurahan di Kecamatan Bangkala	59
3. Banyaknya Penduduk Rumah Tangga dan Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Bangkala Tahun 2004	60
4. Banyaknya Penduduk Laki – laki dan Perempuan Penduduk Kecamatan Bangkala Tahun 2004.....	61
5. Keterlibatan Masyarakat dalam Tugas/Jabatan pada Pembangunan HKm di Desa Kapita.....	64
6. Peran Serta Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan HKm di Desa Kapita	66
7. Peran Serta Masyarakat pada Tahap Pelaksanaan Pembangunan HKm di Desa Kapita	68
8. Peran Serta Masyarakat dalam Perolehan/Distribusi Manfaat/Hasil	

(Tidak Langsung) Pembangunan HKm di Desa Kapita.....	72
9. Peran Serta Masyarakat dalam Perolehan Manfaat/Hasil (Langsung) Pembangunan HKm di Desa Kapita.....	74
10. Peran Serta Masyarakat dalam Monitoring dan Evaluasi Pembangunan HKm di Desa Kapita.....	76
11. Problematika Yang Dihadapi Masyarakat dalam Pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita.....	82
	ix
12. Hasil Yang Dirasakan Masyarakat Dalam Pembangunan HKm di Desa Kapita.....	85
13. Peningkatan Pendapatan Masyarakat Dalam Pembangunan HKm Di Desa Kapita.....	86
14. Frekwensi Responden Berdasarkan Hak dan Kewajiban dalam Pengelolaan HKm di Desa Kapita.....	90
15. Daftar Nama Kelompok Tani Hutan (KTH) yang Terbentuk pada Tahun 2000 di Desa Kapita.....	92
16. Kelompok Usaha Bersama yang Terbentuk di Lokasi	

Pembangunan HKm di Desa Kapita.....	93
17. Frekwensi Responden Berdasarkan Pembentukan Kelompok Tani dalam Pengelolaan HKm di Desa Kapita	93

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1. Kerangka Pikir.....	47
2. Peta Lokasi Penelitian	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hutan merupakan bentuk penutupan lahan asli yang banyak dijumpai di muka bumi. Sejak jaman purba manusia mempunyai hubungan erat dengan hutan. Pada mulanya hutan berfungsi sebagai sumber bahan makanan dan sekaligus tempat untuk berlindung maupun berteduh. Tetapi sejak manusia mulai membudidayakan binatang dan tumbuh – tubuhan untuk memperoleh jaminan sumber makanan, hubungannya dengan hutan berangsur – angsur menjadi semakin berkurang. Bagi masyarakat, hubungan manusia dengan hutan menjadi bersifat tidak langsung. Sejak itu lahirlah berbagai macam fungsi hutan bagi masyarakat, seperti fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, dan fungsi keindahan.

Hutan bagi bangsa Indonesia hutan merupakan kekayaan alam yang tidak terhingga manfaatnya sebagai modal pembangunan nasional. Untuk itu hutan harus diurus, diolah, dilindungi dengan menjaga kelestariannya, dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi pembangunan untuk terciptanya kesejahteraan masyarakat Indonesia baik generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

Undang – Undang Nomor 41/1999 tentang Kehutanan (Dephut, 2000:10) ditegaskan pula tujuan pembangunan sektor kehutanan adalah “untuk mengoptimalisasikan manfaat hutan dengan memaksimalkan daya dukung daerah aliran sungai, meningkatkan pemanfaatan lahan dan konservasi ekosistem, guna peningkatan kesejahteraan manusia Indonesia melalui perluasan kesempatan berusaha dan penciptaan lapangan kerja.”

Selama dari tiga dekade, sub sektor kehutanan telah menjadi salah satu tulang punggung pembangunan ekonomi nasional melalui eksploitasi hutan alam yang digerakan oleh usaha dan industri kehutanan berskala besar, namun kenyataannya kebijakan tersebut telah menumbuhkan degradasi hutan yang salah satunya sebagai akibat kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Saat ini pemerintah menyadari laju degradasi sudah sedemikian besar dan telah menyebabkan kerusakan lingkungan. Banjir dan tanah longsor serta perubahan cuaca menjadi bukti kerusakan hutan dan lingkungan di Indonesia. Untuk menangani hal tersebut pemerintah menetapkan 5 (lima) kebijakan prioritas, yaitu pemberantasan illegal logging, penanggulangan kebakaran hutan, rehabilitasi dan konservasi sumberdaya hutan, rekonstruksi sektor kehutanan, dan penguatan desentralisasi bidang kehutanan. Implementasi kebijakan ini antara lain melalui program Hutan Kemasyarakatan

(*social forestry*) yang dijiwai semangat pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Hutan Kemasyarakatan dipandang sebagai suatu model pengelolaan hutan berbasis masyarakat (partisipatif), yang tujuannya adalah meningkatkan pendapatan masyarakat di dalam dan sekitar hutan (desa hutan) agar kesejahteraannya dapat ditingkatkan tanpa merusak kawasan hutan. Model pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang dikembangkan oleh pemerintah didasarkan pada pertimbangan memanfaatkan lahan kritis dalam kawasan hutan lindung maupun hutan produksi.

Lahirnya keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor : 677/1998 tentang Hutan Kemasyarakatan (HKm) yang kemudian diperbaharui dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor 31/Kpts-II/2001 tentang Penyelenggaraan Hutan Kemasyarakatan, memberi peluang bagi masyarakat setempat dalam pengelolaan hutan. Dalam konsep HKm, pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat bukan bersandar pada pemberian hak – hak eksklusif, melainkan masyarakat itu dipandang mampu untuk melakukan pengelolaan sumberdaya hutan karena mereka telah memiliki kearifan dan pengetahuan lokal unggul yang adaptif dengan karakteristik sumberdaya yang dikelolanya (Pamuji, 1996).

Pembangunan masyarakat di sekitar hutan seringkali dihadapkan dengan permasalahan yang menyangkut kondisi sosial ekonomi dan budaya setempat, termasuk pola kehidupan dan mata pencahariannya. Masyarakat desa hutan khususnya menghadapi masalah kemiskinan dengan pertanian sebagai basis ekonominya. Pola usaha tani yang bersifat ekstentifikasi dan cenderung subsisten, tingkat pendapatan yang rendah serta minimnya sarana dan prasarana menyebabkan rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat desa di dalam dan sekitar hutan (Sayogyo, 1997).

Krisis ekonomi telah menyebabkan terjadinya kelangkaan faktor – faktor produksi, alat pertanian, pupuk, maupun modal. Mahalnya barang – barang faktor produksi akhirnya akan mengganggu aktivitas petani. Tekanan faktor ekonomi yang tinggi dan terbatasnya modal yang dimiliki masyarakat pedesaan, khususnya yang tinggal di dalam dan sekitar hutan, mendorong mereka untuk mencari kegiatan yang paling cepat dan mudah menghasilkan uang, yaitu merambah hutan untuk mengambil kayunya.

Memasuki abad ke-21, tantangan yang dihadapi dalam pembangunan kehutanan di Indonesia semakin besar, antara lain adalah dampak pertambahan penduduk, perambahan hutan, perladangan berpindah, penebangan liar dan pencurian kayu serta belum terwujudnya peningkatan

kesejahteraan masyarakat sekitar hutan adalah bagian agenda pembangunan kehutanan yang belum terselesaikan sampai saat ini.

Struktur ketenagakerjaan di daerah pedesaan yang tidak menguntungkan juga telah mendorong terjadinya perilaku yang mengarah kepada pengurasan sumberdaya hutan secara berlebihan, relatif masih tingginya laju pertumbuhan penduduk di daerah pedesaan, terbatasnya kesempatan kerja, dan tingginya penawaran penduduk usia produktif yang tidak seimbang dengan permintaan tenaga kerja telah mengakibatkan daerah pedesaan menjadi relatif marginal. Kondisi tersebut mendorong masyarakat pedesaan, khususnya disekitar dan/ atau dalam kawasan hutan, menjadi berpikir sempit, yaitu bagaimana mendapatkan pekerjaan yang mudah dan cepat memberi pendapatan, sehingga secara tidak sadar mereka telah terbawa arus untuk ikut dalam *illegal logging*. Kegiatan demikian tentunya sangat tidak menguntungkan bagi pengelolaan sumber daya hutan yang lestari (*sustainable*).

Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi berimplikasi kepada meningkatnya permintaan akan lahan, perumahan, dan pangan. Sementara itu, di sisi lain lahan yang tersedia untuk kegiatan pertanian relatif terbatas. Keadaan tersebut secara tidak langsung mendorong masyarakat untuk merambah areal hutan yang mereka anggap sebagai *common resources*.

Guna mewujudkan peran hutan dalam pembangunan kehutanan secara khusus dan pembangunan kehutanan secara umum, tidak terlepas dari ketersediaan potensi sumberdaya alam hutan yang terdapat di tiap – tiap kawasan atau daerah. Di Propinsi Sulawesi Selatan terdapat kawasan hutan seluas 3.253.892 ha (52,18%), jika dibandingkan dengan luas propinsi Sulawesi Selatan seluas 6.236.171 ha, berarti kawasan hutan lebih luas dibandingkan wilayah daratan lainnya. Sementara di Kabupaten Jeneponto yang luasnya 749,79 Km², memiliki kawasan hutan 9.546 ha (BPS, 2004)

Disamping faktor yang telah disebutkan di atas, salah satu faktor yang juga turut menentukan keberhasilan pembangunan kehutanan khususnya Hutan Kemasyarakatan adalah peran serta masyarakat di sekitar hutan. Peran serta masyarakat tersebut ditunjukkan dengan keterlibatannya dalam proses pelaksanaan proyek mulai dari perencanaan, pelaksanaan kegiatan, perolehan manfaat/hasil, evaluasi dan monitoring, namun yang terjadi di lapangan pada awal kegiatan masyarakat hanya berperan sebagai buruh atau pekerja saja

Di Kabupaten Jeneponto, kondisi hutan terlihat kualitasnya semakin menurun dengan semakin bertambahnya lahan kritis. Hasil inventarisasi dan identifikasi lahan kritis di Kabupaten Jeneponto menunjukkan luas lahan kritis telah mencapai 38.260 Ha. Seperti terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Inventarisasi dan Identifikasi Lahan Kritis di Kabupaten Jeneponto.

No	Tingkat Kekritisan	Luas (Ha)		Jumlah
		Dalam Kawasan Hutan	Luar Kawasan Hutan	
1	Sangat Kritis	1.452	9.246	10.698
2	Kritis	2.011	13.457	15.468
3	Agak Kritis	1.851	10.243	12.094
Jumlah :		5.314	32.946	38.260

Sumber : Data Dinas Kehutanan, Perkebunan dan LH Tahun 2005

Besarnya luas lahan kritis di Kabupaten Jeneponto mengindikasikan bahwa masyarakat lokal kurang dilibatkan dalam pembangunan kehutanan sehingga kehilangan sumber – sumber pangan dan pendapatan yang berdampak pada peminggiran baik secara ekonomi, budaya maupun sosial. Akibatnya pembangunan kehutanan di Kabupaten Jeneponto tidak mencapai hasil seperti yang diharapkan.

Sebagai awal kegiatan, HKm menempati areal 1.000 ha tersebar di kawasan hutan lindung di Desa Kapita, Desa Marayoka dan Desa Gunungsilanu Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto, dimana masyarakatnya mempunyai hubungan timbal – balik dalam untai ekosistem. Untuk itu dipandang perlu dilakukan penelitian dalam rangka mengkaji dan mengungkap beberapa permasalahan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

B. Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dibawah ini dikemukakan rumusan masalah yang akan dibahas adalah :

1. Bagaimana peran serta masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto .
2. Problematika apa saja yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto.
3. Bagaimana strategi yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui peran serta masyarakat terhadap pembangunan Hutan Kemasyarakatan di Desa Kapita Kecamatan Bangkala Kabupaten Jeneponto.
2. Untuk mengetahui problematika apa saja yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto.
3. Untuk mengetahui strategi yang akan dilakukan dalam rangka pengelolaan Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Jeneponto.

D. Kegunaan Penelitian

1. Untuk memberikan masukan dalam perbaikan sistem HKm.
2. Untuk dijadikan kerangka acuan bagi pelaksana kegiatan di lapangan dalam rangka pengelolaan hutan berbasis masyarakat atau pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang berkelanjutan.
3. Melatih penulis untuk memecahkan masalah secara ilmiah dan sebagai bahan acuan untuk penelitian berikutnya yang berkaitan dengan pembangunan Hutan Kemasyarakatan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembangunan Kehutanan

Pembangunan yang dilaksanakan setiap negara berkembang mempunyai perbedaan dalam hal penerapan strategi maupun kebijakan, karena adanya perbedaan kondisi geografis dan kondisi masyarakat bangsa yang bersangkutan. Meskipun demikian pembangunan yang dilaksanakan secara global merupakan suatu proses kegiatan yang terencana untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Menurut Todaro (2000 : 20) Pembangunan adalah proses multi dimensi yang mencakup perubahan – perubahan penting dalam struktur sosial, sikap – sikap rakyat dan lembaga – lembaga nasional, dan juga akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan.

Todaro, (2000:19), mengemukakan adanya tiga komponen dasar atau nilai – nilai yang seharusnya terdapat dalam konsep dan petunjuk praktis untuk memahami arti hakikat pembangunan yaitu :

1. Menunjang kelangsungan hidup, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan – kebutuhan dasar.
2. Harga diri, kemampuan untuk menjadi seorang manusia.

3. Kemerdekaan dari penjajah dan perbudakan dan kemampuan untuk memilih.

White dan Bryant (1987:22-26), mengemukakan agar pembangunan diartikan sebagai peningkatan kemampuan orang untuk mempengaruhi masa depannya. Pembangunan salah satu peningkatan kapasitas untuk mempengaruhi masa depan. Untuk itu implikasi dalam pelaksanaan pembangunan adalah :

1. Meningkatkan kapasitas manusia dalam menentukan sendiri masa depannya.
2. Pembangunan sebagai suatu proses yang menitik beratkan aspek keadilan dalam distribusi pendapatan dan kesempatan untuk menikmati hasil.
3. Pembangunan sebagai proses pertumbuhan kekuatan bagi segenap masyarakat untuk bertindak dalam skala yang lebih besar.
4. Pembangunan harus mempertimbangkan kelangsungannya dengan memberi perhatian yang besar terhadap keterbatasan daya dukung lingkungan.
5. Pembangunan merupakan proses untuk menciptakan saling ketergantungan, bukannya ketergantungan yang bersifat satu arah.

Sejalan dengan hal tersebut Kumorotomo Wahyudi (1991:89) mengemukakan bahwa pembangunan adalah proses perubahan dari suatu keadaan tertentu kearah keadaan lain yang lebih baik. Pembangunan nasional Indonesia selama 40 tahun terakhir sudah mulai berhasil mengangkat taraf kemakmuran ekonomi masyarakat. Akan tetapi prestasi ini tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan dipandang dari aspek – aspek sosial dan nilai – nilai demokrasi.

Berdasarkan paparan di atas, maka pelaksanaan pembangunan komunitas pada skala luas hanya menghasilkan tidak lebih dari seperangkat program dan target baru yang dirumuskan dari pusat dengan pelaksanaan struktur – struktur birokrasi yang konvensional dan tidak dianggap terhadap *preferensi* atau kebutuhan – kebutuhan rakyat setempat.

B. Hutan Kemasyarakatan

Menurut Tjokrowinoto (1993), pembangunan kehutanan yang sentralistik dan ekonomis tidak jarang dapat menimbulkan deforestasi dan degradasi ekologis yang mengakibatkan kemiskinan. Kemiskinan itu baik sebab maupun akibat dari akselerasi erosi hutan yang merupakan kekayaan dasar utama sangat berpengaruh terhadap masyarakat sebagai pemanfaatan utama sumber bio massa dan pengelola ekonomi keluarga seringkali menentukan, baik kelestarian maupun kerusakan hutan.

Menurut Mutholib (1993), pada pertengahan dasawarsa 1970an mulai didasari bahwa pembangunan yang berorientasi pada peningkatan produksi hanya memberi manfaat pada sebagian kecil anggota masyarakat. Eksplorasi nilai – nilai pembangunan yang berorientasi kepada peningkatan kualitas manusia yang bukan saja lebih sensitif terhadap variasi atau kategorisasi manusia, melainkan melihat manusia dalam kerangka tata nilai manusia secara utuh.

Menurut Sumadhijo (1997), dalam upaya mewujudkan Garis – Garis Besar Haluan Negara Tahun 1993 – 1998 yang menyatakan bahwa pembangunan kehutanan diarahkan untuk memberi manfaat bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap menjaga kelestarian dan kelangsungan fungsi lingkungan hidup, meningkatkan sumber pendapatan negara dan devisa serta memacu pembangunan daerah, maka Departemen Kehutanan mengembangkan berbagai bentuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial atau HKm dimaksudkan untuk memajukan interaksi positif antara masyarakat dan hutan, terutama terhadap masyarakat lokal yang bermukim di dalam dan sekitar hutan.

Hutan Kemasyarakatan adalah bentuk perhutanan sosial yang dilaksanakan dalam kawasan hutan. Pengembangan HKm berdasarkan pada visi tidak hanya sekedar memberikan alternatif pada pemberian kesempatan

kepada masyarakat lokal. Sumberdaya hutan ini dimanfaatkan secara bersama untuk sebesar – besarnya kemakmuran rakyat dengan senantiasa memperhatikan sumberdaya alam setempat.

Hutan Kemasyarakatan (HKm) adalah sistem pengelolaan pada kawasan hutan negara yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat setempat (lokal) sebagai pelaku utamanya, dengan mengimplemtasikan sistem teknis kehutanan dan kearifan lokal serta nilai – nilai budaya masyarakat setempat, dalam rangka memberdayakan masyarakat (Sutrisno, 2002).

Hutan Kemasyarakatan (HKm) merupakan suatu upaya pengelolaan hutan untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara hutan dan masyarakat sekitarnya. Menurut Arnold (1992) munculnya HKm yang melibatkan masyarakat desa di sekitar dan di dalam kawasan hutan, dibutuhkan suatu pemahaman baru mengenai beberapa kepentingan yang menghubungkan masyarakat dengan hutan. HKm berasal dari pekerjaan hutan untuk mengadakan hubungan baru dengan masyarakat setempat, dan untuk menanggapi keinginan masyarakat setempat yang erat kaitannya dengan pertumbuhan populasi masyarakat desa.

Ide HKm menurut Zain (1997) berasal dari beberapa negara di Eropa dan negara tetangga dalam penerapan *social forestry*. Di Indonesia disebut

sebagai program perhutanan sosial dengan model *agroforestry*, selanjutnya dijabarkan lagi ke dalam Hutan Kemasyarakatan (HKm).

Noronha (1982) tidak membedakan antara *social forestry* dengan *community forestry*. *social forestry* berbeda dalam beberapa aspek dengan kehutanan yang bersifat komersil, yaitu : (1) *social forestry* pada umumnya mencakup pemanfaatan hutan non kayu, dan (2) *community forestry* melibatkan langsung pihak penerima manfaat yang bersangkutan. Dalam pelaksanaan *social forestry* diperlukan perubahan sikap petugas kehutanan. Petugas kehutanan bukan lagi petugas penjaga hutan terhadap gangguan masyarakat, melainkan harus melakukan kerjasama dengan masyarakat dalam melakukan budidaya pohon – pohon, baik secara perorangan maupun secara berkelompok.

Hutan Kemasyarakatan telah diartikan dalam berbagai bentuk, sebagian besar definisi ditujukan pada pengawasan pengelolaan sumberdaya hutan oleh masyarakat desa yang menggunakan hutan untuk tujuan tersebut, dan sebagai penyatuan bagian sub sistem dari sistem usaha tani. Dalam hal ini masyarakat yang melaksanakan tugas mengelola hutan perlu mendapat bantuan teknis dan bimbingan yang diperlukan dari ahli kehutanan.

Hutan Kemasyarakatan dimulai sebagai usaha strategi untuk mengelola hutan dibawah tekanan penduduk yang tinggi dan sumberdaya lahan yang terbatas. Usaha – usaha melalui berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan HKm melalui berbagai kebijakan dan strategi pengelolaan dan pemanfaatan HKm untuk memenuhi berbagai permintaan masyarakat setempat dan masyarakat luas, serta untuk menyelesaikan permasalahan konflik antara berbagai keperluan yang berbeda.

Soedrajat (1994) mengemukakan bahwa HKm adalah suatu sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat (petani) peladang berpindah atau perambah hutan yang diarahkan pada kegiatan tanam menanam jenis – jenis pohon multi fungsi yang dikombinasikan tanaman semusim, dengan tujuan peningkatan kesejahteraan dan rehabilitasi hutan.

Hutan Kemasyarakatan adalah sistem pengelolaan hutan berdasarkan fungsinya dengan mengikut sertakan masyarakat. Kegiatan HKm dilaksanakan untuk meningkatkan daya dukung lahan melalui pemanfaatan ruang tumbuh yang ada dan bagian – bagian tertentu dari tanaman diluar kawasan hutan.

Versun yang dikutip oleh Leuhery (1989) mengemukakan bahwa "HKm merupakan suatu strategi pengelolaan hutan yang berkaitan erat dengan kegiatan penduduk setempat dalam kegiatan – kegiatan kehutanan dan

penanaman pohon – pohon yang dilaksanakan oleh penduduk sendiri sehingga mereka dapat memperoleh manfaat melalui usahanya”.

Veer yang dikutip Leuhery (1989) menguraikan pengertian tentang HKm secara lebih detail, yaitu :

- 1) Segala kegiatan yang menyangkut penanaman dan pengelolaan hutan atau tanaman kayu – kayuan yang dilakukan oleh orang awam kehutanan di lahan miliknya atau kadang – kadang di lahan orang lain.
- 2) Campur tangan pihak petugas kehutanan pada penggunaan atau pola tanam di lahan milik.
- 3) Adaptasi pengelolaan hutan negara supaya kesejahteraan masyarakat desa sekitar hutan dapat ditingkatkan.

Menurut Yunus dan Alam (2001) pembangunan HKm harus didasari prinsip – prinsip sebagai berikut :

- 1) Prinsip berkeadilan. Agar masyarakat lokal yang tinggal dalam dan sekitar hutan mendapat kesempatan yang sama baik laki – laki maupun perempuan untuk mengusahakan aset produksi nasional yang berupa sumber daya hutan. Jiwa pembangunan ini perlu mendapat dukungan melalui perwujudan bentuk – bentuk desentralisasi pengambilan keputusan.

- 2) Prinsip partisipatif. Masyarakat laki – laki maupun perempuan diberi kesempatan dan kepercayaan yang sama untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan dan pelestarian sumberdaya alam setempat.
- 3) Prinsip kemandirian. Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada masyarakat untuk berswakarsa, berswadaya, berwakelola, serta tidak terlalu memerlukan pembinaan.
- 4) Prinsip desentralisasi. Pemerintah daerah dengan otonomininya memberi fasilitas dan mengakomodasi kepentingan masyarakat dengan tidak membedakan antara kaum laki – laki dan kaum perempuan dalam mengelola hutan dengan segala aspeknya.
- 5) Prinsip kemitraan. Pengembangan bentuk hubungan antara masyarakat lokal/setempat dengan pihak luar harus dilandaskan suasana kemitraan yang sejajar.
- 6) Prinsip berkelanjutan. Terjaminnya kelangsungan kegiatan pembangunan oleh masyarakat untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
- 7) Prinsip pertanggung jawaban kepada masyarakat. Pengebalaan hutan harus mampu mempertanggungjawabkan segala tindakan yang

diambil kepada masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat pengelola hutan.

- 8) Prinsip Ekonomi. Hutan Kemasyarakatan harus mampu memberi keuntungan ekonomi bagi masyarakat dan negara sehingga tercipta kesejahteraan bersama.
- 9) Prinsip interaktif. Pembangunan Hutan Kemasyarakatan harus terintegrasi dan sinergi dengan sektor lain.

C. Konsep Keterlibatan

1. Pengertian Keterlibatan

Menurut (Rogers, 1989:163, Todaro, 1991:89) : " Pembangunan adalah proses peran serta atau keterlibatan dan harus dipahami sebagai proses berdimensi jamak yang melibatkan perubahan berbagai aspek dalam masyarakat "

Sedangkan Slamet (1992:3) memberi batasan berdasarkan bahwa manfaat pembangunan yang dapat dinikmati pelaku keterlibatan, keterlibatan sangat bergantung pada besar dan mutu sumbangannya dalam pembangunan dan juga sangat tergantung pada tingkat kemampuan dan kesempatan yang diperolehnya untuk ikut serta dalam pembangunan tersebut.

Hamidjoyo dalam Sastropoetra (1988) berpendapat bahwa untuk mencapai perubahan yang mengarah kepada perbaikan diperlukan suatu strategi sebagai pola penentuan serangkaian tujuan – tujuan dari perubahan yang diinginkan dengan keterlibatan sosial. Strategi itu mencakup konsepsi keterlibatan tentang masukan materi perubahan (inovasi dengan dana dan tenaga yang dianggap paling efektif dan efisien serta dituangkan dalam sistem untuk menimbulkan perubahan kearah perbaikan). Hal tersebut mencakup obyek keterlibatan yang dapat berbentuk menyeluruh seperti program yang sederhana.

Cohen dan Uphoff (1977) mengemukakan bahwa : "keterlibatan masyarakat adalah keterlibatan aktif masyarakat secara sukarela dalam seluruh tahapan proses pembangunan, bukan melalui para wakilnya"

Keterlibatan dalam pembangunan kehutanan merupakan sebuah proses dimana berbagai *stakeholders* terlibat, mempengaruhi, mengendalikan pembangunan kehutanan ditempat mereka masing – masing. Di samping itu, mereka juga turut serta secara aktif dalam memprakarsai perbaikan kehidupan mereka, melalui proses pembuatan keputusan dan perolehan sumberdaya dan penggunaannya. Dalam pengertian ini, proses perubahan atau pembangunan akan ditentukan

oleh aktifitas dan kreatifitas masyarakat sendiri dengan difasilitasi oleh pemerintah atau organisasi lain seperti KSM dan LSM.

Menurut Tikson (2001:6) keterlibatan memiliki beberapa unsur sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan secara aktif masyarakat didalam setiap langkah siklus proyek, mulai pembuatan keputusan, perencanaan sampai monitoring dan evaluasi.
- 2) Penggalangan berbagai kekuatan masyarakat (tenaga, pikiran dan sumberdaya) dan penggunaannya dalam pembangunan sehingga peranan mereka menjadi penting.
- 3) Menggunakan beberapa metode, prosedur teknik – teknik tertentu untuk memfasilitasi kegiatan keterlibatan.
- 4) Adanya pembuatan keputusan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa terlalu banyak dibantu oleh pihak luar.
- 5) Institusi kemandirian dalam menentukan nasib dan pertumbuhan masyarakat kearah yang lebih baik dan artinya, keterlibatan *stakeholder* akan menjadi rutin dalam setiap kegiatan manajemen dan pembangunan.

Pada umumnya setiap pembangunan yang dilakukan merupakan tanggungjawab masyarakat dalam mengelola dan

memelihara, sedangkan pemerintah sebagai fasilitator. Dengan demikian bahwa setiap pembangunan diperlukan keterlibatan masyarakat baik dalam mengambil keputusan atau gagasan yang dapat menunjang keberhasilan pembangunan tersebut.

Keterlibatan masyarakat pada dasarnya merupakan bagian interaksi sosial atas adanya hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau antara kelompok dengan kelompok berdasarkan potensi atau kekuatan masing – masing.

Secara operasional pengertian keterlibatan atau peran serta adalah keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam suatu proses pencapaian tujuan yang dilakukan oleh pribadi atau kelompok yang diorganisir serta berlandaskan kemampuan yang memadai, turut serta memuluskan tujuan dengan rasa tanggungjawab yang dijiwai oleh rasa turut memiliki, dapat pula diartikan kesadaran keikutsertaan penghuni atau warga dalam melaksanakan kegiatan akan menimbulkan pula rasa tanggungjawab untuk memelihara dan menjaga merosotnya prasarana pemukiman. Untuk memperoleh gambaran mengenai keterlibatan, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli :

Tjokroamidjojo (1984:22) mengemukakan bahwa keterlibatan adalah keikutsertaan masyarakat atau rakyat sesuai mekanisme proses politik dalam salah satu negara, turut menentukan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Laloasa (2001:9) memberi pengertian keterlibatan masyarakat sebagai "suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh manusia dengan sadar dengan mengikut sertakan baik jiwa raga maupun harta bendanya, untuk mendukung terlaksananya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan".

Kemudian Ndraha (1990:29) mempertegas pengertian keterlibatan sebagai keterlibatan fisik, mental dan emosi seseorang atau sekelompok masyarakat desa dalam gerakan pembangunan, mendorong yang bersangkutan atas kehendak atau prasarana sendiri menurut kemampuan yang mengambil bagian dalam usaha penyelenggaraan suatu program dalam kegiatan pembangunan.

Menurut Rukmana dkk (1993:214) alasan efektifitas dan efisiensi keterlibatan masyarakat yang nyata dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Keterlibatan masyarakat memberi kontribusi pada upaya pemanfaatan sebaik – baiknya sumber dana yang terbatas.
- 2) Keterlibatan masyarakat membuka kemungkinan keputusan yang diambil didasarkan pada kebutuhan, prioritas dan kemampuan masyarakat. Hal ini dapat menghasilkan rancangan, rencana program dan kebijakan yang lebih realistis. Selain itu memperbesar kemungkinan masyarakat bersedia, mampu menyumbangkan sumberdaya mereka seperti uang, tenaga bagi pelaksanaan operasi dan pemeliharaan.
- 3) Masyarakat menjamin penerimaan dan apresiasi yang lebih besar terhadap segala sesuatu yang dibangun. Hal ini akan merangsang pemeliharaan yang baik dan bahkan menimbulkan kebanggaan.

Berdasarkan paparan diatas, maka keterlibatan adalah merupakan salah satu cara untuk memotivasi yang mempunyai ciri khas yang lain dari pada yang lain. Hal ini disebabkan peningkatan keterlibatan tidak ditekankan pada segi materi, dimana dengan

jalan melibatkan seseorang didalamnya, maka orang tersebut akan merasa ikut bertanggungjawab.

Adapun cara – cara untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menurut Nitisemito (1992:262) antara lain :

- 1) Mengikut sertakan secara langsung dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan
- 2) Menjelaskan tentang maksud dan tujuan keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan
- 3) Meminta tanggung jawab dan saran tentang keputusan dan perencanaan yang dikeluarkan
- 4) Meminta informasi tentang segala sesuatu dari mereka dalam usaha membuat keputusan dan perencanaan
- 5) Memberi kesempatan untuk ikut memiliki
- 6) Meningkatkan pendelegasian wewenang

Menurut Sarbidi (1999:37) dalam penelitiannya menyatakan bahwa parameter – parameter yang dianggap dominan yang mempengaruhi perilaku masyarakat antara lain :

- 1) Aspek lingkungan fisik seperti lokasi permukiman dan prasarana yang ada.

- 2) Aspek lingkungan sosial budaya seperti kondisi keterkaitan sosial/hidup penduduk, pendidikan yang rendah.
- 3) Aspek pengaturan pemerintah, seperti undang – undang, peraturan pemerintah, kebijaksanaan serta pengawasan.

Supriatna (2000:209) menjelaskan beberapa alasan pembenaran bagi keterlibatan rakyat dalam pembangunan yaitu :

- 1) Rakyat adalah fokus sentral dan tujuan terakhir pembangunan, keterlibatan merupakan akibat logis dari dalil tersebut.
- 2) Keterlibatan menimbulkan harga diri dan kemampuan pribadi untuk dapat turut serta dalam keputusan penting yang menyangkut masyarakat
- 3) Keterlibatan menciptakan suatu lingkungan umpan balik arus informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi daerah yang tanpa keberadaan akan tidak terungkap.
- 4) Pembangunan dilaksanakan lebih baik dengan dimulai dari mana rakyat berada dan dari apa yang mereka miliki.
- 5) Keterlibatan menopang pembangunan.

- 6) Keterlibatan menyediakan lingkungan yang kondusif, baik bagi aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia.
- 7) Keterlibatan merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kebutuhan khas daerah.

Menurut Kartasasmita (1996). Dalam menggerakkan keterlibatan masyarakat maka, tugas manajemen pembangunan menjamin bahwa pembangunan : (1) Harus menguntungkan masyarakat/rakyat, (2) Harus dipahami maksudnya oleh masyarakat, (3) Harus mengikut sertakan masyarakat dalam pelaksanaan, (4) Dilaksanakan sesuai dengan maksudnya, secara jujur, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan sejumlah definisi keterlibatan yang sudah dikemukakan, maka keterlibatan pada pokoknya adalah (1) Kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan, (2) Suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal tersebut (3) Pemantapan dialog antar masyarakat

setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak sosial (4) Keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukan sendiri (5) Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan mereka.

Pada hakekatnya bahwa jika masyarakat benar – benar diberi kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan, pembangunan diperkirakan akan berlangsung lebih efektif dan efisien.

Rukmana dkk (1993:215) mengemukakan bahwa keterlibatan masyarakat adalah sumbangan sumberdaya yang terbagi atas :

- 1) Keterlibatan bersifat nyata dan terukur dalam bentuk :
uang, tanah dan tenaga.
- 2) Keterlibatan yang bersifat tidak dapat diukur/ tak nampak yang akan menghasilkan efektifitas dan efisiensi yang lebih besar yaitu dalam bentuk pengetahuan, kreativitas, keterampilan dan organisasi.

Apabila masyarakat tidak diberi kesempatan menyumbangkan sumberdaya yang tidak tampak ini, mereka akan kehilangan

motivasi, kemauan dan antusiasme untuk mengembangkan sumberdaya lain yang tampak dan terukur. Ndraha (1990:103) mengemukakan sejumlah tahapan dalam proses keterlibatan masyarakat demi kelancaran pembangunan yang ada, maka dibagi dalam enam tahap atau fase yaitu :

- 1) Keterlibatan dalam memberi dan menerima dan memberi informasi yang diterima.
- 2) Keterlibatan dalam memberi tanggapan terhadap informasi yang diterima.
- 3) Keterlibatan dalam perencanaan pembangunan termasuk pengambilan keputusan.
- 4) Keterlibatan dalam operasional pembangunan.
- 5) Keterlibatan dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil – hasil pembangunan.
- 6) Keterlibatan dalam menilai hasil pembangunan.

Keterlibatan masyarakat tidak dapat berjalan tanpa adanya dorongan dari pihak – pihak tertentu. Menurut Ndraha (1987:123) bahwa faktor pendorong keterlibatan dan pada keadaan sebaliknya dianggap sebagai faktor penghambat.

2. Tahapan keterlibatan

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Hutan Kemasyarakatan untuk meningkatkan peran serta masyarakat, perlu didukung oleh faktor:

a. Perencanaan

Ada beberapa definisi perencanaan yang perumusannya berbeda – beda dengan yang lain. Cunningham (Made Fidata, 1997:1) mengemukakan bahwa perencanaan adalah menyeleksi dan menghubungkan pengetahuan, fakta – fakta , imajinasi dan asumsi – asumsi masa yang akan datang untuk tujuan memvisualisasi dan memformulasi hasil yang diinginkan, untuk kegiatan yang diperlukan, dan perilaku dalam batas – batas yang dapat diterima yang akan digunakan dalam penyelesaian.

Definisi perencanaan yang dikemukakan oleh Cunningham di atas menekankan kepada usaha menyeleksi dan menghubungkan sesuatu untuk kepentingan masa yang akan datang dan bagaimana usaha untuk mencapainya. Apa wujud yang akan datang dan bagaimana usaha untuk mencapainya adalah merupakan perencanaan.

Defenisi perencanaan dikemukakan oleh Pidarta (1997:4) bahwa perencanaan adalah hubungan apa adanya sekarang

(*what is*) dengan bagaimana seharusnya (*What should be*) yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan, prioritas, program dan alokasi sumber. Bagaimana seharusnya adalah mengacu pada masa yang akan datang.

Pengertian perencanaan di atas nampak menerangkan pada usaha mengisi kesenjangan antara keadaan sekarang dengan keadaan pada masa yang akan datang yang sesuai dengan apa yang dicita – citakan, ialah menghilangkan jarak antara keadaan sekarang dengan keadaan mendatang yang diinginkan.

Perencanaan adalah fungsi pertama dan utama manajemen. Dengan perencanaan orang dapat mengetahui apa, mengapa, dimana, kapan, siapa dan bagaimana suatu pekerjaan dilakukan. *Panglaykim dan Hazil (1997:79)* mengemukakan perencanaan sebagai berikut :

- 1) Perencanaan harus berdasarkan pada kenyataan, pada data dan keterangan yang kongkrit, tidak pada bagaimana maunya kita, keinginan kita dan sebagainya.
- 2) Perencanaan adalah suatu pekerjaan mental yang memerlukan pemikiran, imajinasi dan kesanggupan melihat kedepan.

- 3) Perencanaan mengenai zaman datang dan tindakan – tindakan apa yang dapat dilakukan jika ada rintangan tiba – tiba muncul atau kesulitan – kesulitan mengganggu kelancaran usaha.

Perencanaan akan berfungsi sebagai pedoman atau acuan kerja dan dapat menentukan sumberdaya yang dibutuhkan sekaligus juga sebagai tolok ukur pengendalian atau pengawasan. Perencanaan ada yang berjangka panjang, menengah dan pendek dan memenuhi syarat, realitas praktis dan bersifat praktis (Robbin. 1992:128).

Definisi perencanaan yang telah dikemukakan diatas memperlihatkan rumusan dan tekanan yang berbeda. Yang satu mencari wujud yang akan datang serta usaha untuk mencapainya, yang lain menghilangkan kesenjangan antara keadaan seharusnya dengan keadaan masa datang, dan yang satu lagi mengubah keadaan agar sejalan dengan keadaan lingkungan yang juga berubah.

Soedjadi (1989:3) mengenai perencanaan mengemukakan sebagai berikut proses kegiatan dari seorang pimpinan (manajer) yang harus dilakukan dengan mempergunakan cara – cara

pemikiran yang ilmiah maupun praktis untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan dengan melalui kerja sama orang lain sebagai sumber tenaga kerja, serta memanfaatkan sumber – sumber lainnya dan waktu yang tersedia untuk itu dengan cara yang tepat.

Apabila mencermati pengertian diatas, maka dalam suatu perencanaan yang penting diperlihatkan adalah :

- 1) Untuk mencapai tujuan dan sasaran rencana dengan memperhatikan sumber – sumber daya dan alternatif yang dipandang terbaik, dalam hal ini yang meminta perhatian adalah perlunya koordinasi antar berbagai kegiatan, penggunaan sumber dan penerapan serta penyusunan skala prioritas.
- 2) Penterjemahan rencana dalam program – program kegiatan yang kongkret.
- 3) Penetapan jangka waktu pencapaian tujuan / sasaran.

b. Pelaksanaan

Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keterlibatan

Menurut Soetrisno (1995), yang mengemukakan ada tiga variasi bentuk keterlibatan yaitu :

- 1) Keterlibatan terbatas, yaitu keterlibatan yang hanya digerakkan untuk kegiatan – kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan, tetapi tidak untuk kegiatan tertentu yang dianggap menimbulkan kerawanan bagi stabilitas nasional dan kalangan pembangunan.
- 2) Keterlibatan penuh (*full scale partisipation*), artinya keterlibatan yang seluas – luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan.
- 3) Mobilisasi keterlibatan, artinya keterlibatan dibangkitkan pemerintah/penguasa, tetapi masyarakat sama sekali tidak diberi kesempatan untuk mempertimbangkan kepentingan pribadi dan tidak diberi kesempatan untuk mengajukan tuntutan maupun mempengaruhi jalannya kebijakan pemerintah.

Beberapa faktor yang mempengaruhi peran serta masyarakat yaitu :

- a. Kemauan

Kemauan merupakan kunci utama bagi tumbuh dan berkembangnya keterlibatan masyarakat dalam

pembangunan, sebab kemampuan dan kesempatan yang cukup belum merupakan jaminan bagi tumbuh dan berkembangnya keterlibatan masyarakat, jika mereka sendiri tidak memiliki kemauan untuk turut membangun.

Sebaliknya adanya kemauan untuk mendorong seseorang untuk meningkatkan kemampuan aktif memburu dan memanfaatkan setiap kesempatan. Kemauan untuk membangun ini ditentukan oleh sikap mental yang dimiliki masyarakat yang menyangkut :

- 1) Sikap untuk meninggalkan nilai – nilai untuk menghambat pembangunan.
- 2) Sikap terhadap penguasa atau pelaksana pembangunan.
- 3) Sikap untuk selalu ingin memperbaiki hidup dan tidak cepat putus asa.
- 4) Sikap kebersamaan untuk dapat memecahkan masalah dan tercapainya tujuan pembangunan.
- 5) Sikap kemandirian atau percaya diri atas kemampuannya untuk memperbaiki mutu hidupnya.

b. Kemampuan

Perlu disadari bahwa, adanya kesempatan yang disediakan/ditumbuhkan untuk menggerakkan keterlibatan masyarakat akan tidak banyak berarti, jika masyarakatnya tidak memiliki kemampuan untuk terlibat, yang dikasud dengan kemampuan disini adalah :

- 1) Kemampuan untuk menemukan dan memahami kesempatan untuk membangun atau pengetahuan tentang peluang untuk membangun (memperbaiki mutu hidupnya).
- 2) Kemampuan untuk melaksanakan pembangunan yang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan keterampilan yang dimiliki.
- 3) Kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapi dengan menggunakan sumberdaya dan kesempatan lahan yang tersedia secara optimal, pendapatan, pendidikan dan luas penguasaan lahan.

c. Kesempatan

Dalam kenyataan, banyak program pembangunan yang kurang memperoleh peran serta masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan. Di lain pihak, juga sering dirasakan tentang kurangnya informasi yang disampaikan kepada masyarakat mengenai kapan dan dalam bentuk apa dapat dituntut untuk berperan serta.

Beberapa kesempatan yang dimaksud disini adalah :

- 1) Kemampuan politik dari penguasa untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan, baik dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pemanfaatan pembangunan sejak ditingkat pusat sampai jajaran birokrasi yang paling bawah.
- 2) Kesempatan untuk memperoleh informasi pembangunan.
- 3) Kesempatan untuk memanfaatkan dan memobilisasi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk pelaksanaan pembangunan.

- 4) Kesempatan memperoleh dan menggunakan teknologi yang tepat (termasuk peralatan, perlengkapan dan penunjangnya).
- 5) Kesempatan untuk berorganisasi termasuk untuk memperoleh dan menggunakan peraturan, perizinan dan prosedur kegiatan yang harus dilaksanakan.
- 6) Kesempatan mengembangkan kepemimpinan yang mampu menumbuhkan, menggerakkan serta memelihara ketertiban masyarakat.

c. Pemanfaatan Hasil

Peran serta masyarakat dalam pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kondisi sosial masyarakat, melalui suatu kegiatan yang memberi manfaat secara langsung sehingga kondisi ekonominya menjadi lebih baik atau meningkat.

Manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dalam peran sertanya dalam pembangunan, dapat berbentuk material, sosial, manfaat material berupa barang – barang pribadi dan peningkatan hasil pendapatan tidak langsung yaitu, terciptanya iklim mikro yang dapat menunjang terciptanya kelestarian Hutan Kemasyarakatan.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi adalah kegiatan membandingkan atau mengukur apa yang sedang dan telah dilaksanakan dengan kriteria dan norma – norma peraturan, standar atau rencana – rencana yang telah ditetapkan sebelumnya, menurut Suwignyo (1985:110).

Berdasarkan pengertian diatas, maka kegiatan monitoring dan evaluasi tidak akan mungkin dilaksanakan tanpa unsur – unsur sebagai berikut:

- 1) Seperangkat kriteria yang harus ditetapkan sebelumnya guna mengukur penyelenggaraan.
- 2) Suatu sistem yang dapat memuat kesalahan – kesalahan dan penyimpangan – penyimpangan menjadi nampak.

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring biasanya dimuat dalam buku pedoman kerja. Disamping itu diperlukan suatu sistem pelapor (*reporting*) yang teratur oleh bawahan kepada pimpinan.

Berkaitan hal diatas, maka unsur – unsur pokok dalam monitoring dan evaluasi menurut Suwignyo (1985:111) :

- 1) Penentuan standar evaluasi, standar ditetapkan dengan mengingat rencana yang telah ditetapkan

- 2) Pengukuran, perbandingan hasil kerja nyata dengan standar yang telah ditentukan.
- 3) Penilaian untuk menentukan gap antara hasil – hasil yang nyata dengan hasil – hasil yang diharapkan menurut standar/ rencana.
- 4) Tindakan kongkrit terhadap penyimpangan, baik sesudah pekerjaan maupun sementara pekerjaan berlangsung, hal mana tergantung pada penyimpangan.

D. Problematika yang Dihadapi Masyarakat untuk Berperan Serta dalam Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan.

Problematika berasal dari bahasa Inggris "problem" yang artinya soal, masalah, persoalan. Demikian pula dalam kamus bahasa Indonesia kata "problem" dimaknakan pula sebagai soal atau masalah. Sedangkan kata problematika (*problematical*) itu sendiri bermakna "merupakan persoalan" (Echol dan Shadili, 1997).

Problematika sesungguhnya adalah berbagai persoalan yang dihadapi berkaitan dengan kehidupan. Problematika yang dihadapi oleh masyarakat untuk berperan serta mengandung makna masalah – masalah yang menjadi kendala bagi masyarakat yang bersangkutan untuk ikut serta dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, dan melibatkan masyarakat di satu sisi. Masalah atau kendala itu lahir karena adanya

perbedaan latar belakang kepentingan, kebutuhan, dan kelembagaan serta sistem atau aturan, nilai yang berlaku di masing – masing pihak (Pamulardi,1995).

Simon (2000) menggambarkan, bahwa kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan saat ini bersifat paradoksial. Kebijakan pengusahaan hutan cenderung membela pencapaian target kuantum produksi kayu gelondongan. Sementara itu, instrumen untuk memelihara kelestarian lingkungan tidak berjalan secara efektif, sehingga kerusakan tetap melaju dengan kecepatan yang mengawatirkan.

Upaya pengelolaan hutan oleh masyarakat terbentur pada perbedaan nilai hutan menurut masing – masing *stakeholder* serta perbedaan pemaknaan terhadap masyarakat, menghasilkan situasi sarat sengketa. Pada gilirannya, persengketaan itu akan menurunkan suatu kelembagaan dan keorganisasian yang juga sarat sengketa.

Problematika yang dihadapi masyarakat dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, terutama pada benturan kepentingan dan keinginan serta kepemilikan. Masyarakat merasa merdeka untuk melakukan pengelolaan sumberdaya ini dengan cara sendiri. Sebagian masyarakat mengelolanya secara arif, namun ada pula yang mengelolanya secara tidak bijaksana.

Terminologi Garret Hardin sebagaimana yang diungkapkan Tinambuan (1996), bahwa kearifan dalam pengelolaan sumberdaya tersebut menghasilkan suatu *"tragedy of the common"* yaitu suatu bentuk kehancuran sumberdaya akibat adanya pendayagunaan yang berlebihan.

Peran serta sering dipahami secara keliru dan sepihak. Para perencana pembangunan, pemerintah dan aparat memahami peran serta masyarakat sebagai dukungan yang harus diberikan oleh rakyat pada keputusan, rencana pembangunan yang sudah diputuskan dari atas (*top down*). Ukuran yang dipakai adalah sejauh mana rakyat menanggapi dan melaksanakan, serta bersedia berkorban baik waktu, maupun hidupnya untuk pembangunan. Bila masyarakat tidak patuh atau tidak mau mendukung berarti tidak ikut berperan serta. Pandangan ini memperlakukan masyarakat sebagai obyek pembangunan dan segala usul, aspirasi yang berasal dari rakyat (*bottom up*) dianggap sebagai keinginan belaka. Untuk itu peran serta masyarakat hendaknya berjalan sukarela tanpa paksaan, karena peran sertanya dapat dipandang pula sebagai suatu kekuatan penting dalam menentukan keberhasilan proses pembangunan.

Sallatang (1997), menyatakan beberapa hal yang menyebabkan rendahnya peran serta masyarakat dalam pembangunan atau pelaksanaan proyek, diantaranya :

1. Proyek yang dilaksanakan sebelumnya tidak dibicarakan secara tuntas dengan masyarakat. Mereka merasakan atau sekedar dimintai dan diharapkan menerima dan melaksanakan saja. Demikian sehingga, proyek yang dilaksanakan tidak atau kurang merupakan hasil kesepakatan diantara para pelaksana. Karenanya masyarakat kurang memiliki rasa tanggungjawab.
2. Tidak atau kurang diikutsertakannya masyarakat berperan serta dalam tahap perencanaan sebagai tahap pertama dalam menyelenggarakan suatu proyek, yang justru dalam penilaiannya merupakan suatu rangkaian kegiatan penting dirasakan oleh masyarakat. Sehingga masyarakat kurang ikut serta dalam proyek atau sedikitnya mereka merasa tidak diperhatikan.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa problematika adalah masalah, kendala , hambatan dan tantangan yang dihadapi. Dengan demikian problematika yang dihadapi masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan adalah masalah – masalah atau kendala – kendala yang dihadapi masyarakat sebagai obyek pembangunan semata tanpa memberi kesempatan untuk ikut serta dalam setiap proses pembangunan yang menyebabkan terhambatnya untuk berperan serta dalam pengelolaan Hutan Kemasyarakatan, baik yang berasal

dari lingkungan masyarakat itu sendiri maupun dari luar lingkungan masyarakat.

E. Strategi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang Berkelanjutan.

Definisi strategi pertama kali dikemukakan oleh Chandler pada tahun 1962 sebagaimana dikutip Rangkuti (2001:14) menyebutkan bahwa "strategi adalah tujuan jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumberdaya yang penting untuk mencapai tujuan tersebut".

Swastha (1999) mendefinisikan strategi sebagai rancangan besar yang menggambarkan bagaimana sebuah perusahaan harus beroperasi untuk mencapai tujuan. Dilain pihak Simon (2000) menyatakan bahwa strategi adalah pola – pola berbagai tujuan serta kebijaksanaan dasar dan rencana – rencana untuk mencapai tujuan tersebut dirumuskan sedemikian rupa sehingga jelas usaha apa yang sedang dan akan dilaksanakan oleh instansi, perusahaan baik sekarang maupun masa akan datang.

Strategi adalah seperti jalan, dimana sebuah perencanaan untuk menetapkan mulai dari mana kita berada menuju tempat yang akan kita tuju. Merencanakan strategi seperti merencanakan sebuah perjalanan. Sama-sama membutuhkan sebuah keputusan etika dan sebuah organisasi yang akan membangun sebuah strategi maupun sebuah keluarga akan berlibur (Halim, 2002).

Strategi dapat disimpulkan sebagai suatu cara, taktik, pola, serta kebijaksanaan yang dirancang/direncanakan sedemikian rupa demi kepentingan bersama dengan melakukan kegiatan untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tetap memperhatikan koordinasi satu dengan yang lainnya dengan saling mendukung.

Strategi dalam konsep pengelolaan Hutan Kemasyarakatan berpijak dan diilhami makna yang terkandung dalam pasal 33 (3) UUD 1945 dan dengan mengacu pada paradigma baru pengelolaan hutan dan visi pengelolaan hutan Indonesia yang telah dirumuskan oleh Departemen Kehutanan, selain berorientasi ekologis (hutan Indonesia sebagai paru – paru dunia) dan ekonomis (hutan Indonesia sebagai lumbung kayu dunia), juga berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat serta kemakmuran bangsa (Munggoro, 2001).

Strategi pengelolaan hutan secara eksplisit dikemukakan pentingnya peran aktif masyarakat terutama dalam aspek pengembangan sumberdaya manusia, penguatan kelembagaan masyarakat setempat, pengembangan sarana dan prasarana pendukung usaha kehutanan dan peningkatan akses masyarakat pada sumberdaya hutan, teknologi, sumber dana dan akses kepada pasar serta peningkatan peluang berusaha dalam bidang produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi nasional (Dephut, 2001).

Berdasar pada uraian di atas, jika dikaitkan dengan penelitian ini, maka yang dimaksud dengan strategi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang berkelanjutan adalah suatu cara dan teknik, serta kebijakan yang digunakan dalam merencanakan, melakukan, memanfaatkan dan mengevaluasi pelaksanaan, melalui pematapan program serta pemantapan program Hutan Kemasyarakatan yang melibatkan berbagai pihak yang saling terkait untuk kepentingan pengelolaan hutan secara adil dan lestari dari generasi ke generasi berikutnya demi menjaga kesinambungan sosial ekonomi terutama kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan fungsi ekologisnya

F. Kerangka Pikir.

Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam rangka peran serta masyarakat dalam pembangunan HKM, terdapat beberapa tahapan keterlibatan, seperti yang dikemukakan oleh Stephens (1988) serta Cohen dan Uphoff (1977) yaitu : (1) Keterlibatan pada tahap perencanaan; (2) Keterlibatan pada tahap pelaksanaan; (3) Keterlibatan pada tahap pemanfaatan; dan (4) Keterlibatan pada tahap penilaian hasil pembangunan.

1. Peran Serta pada Tahap Perencanaan

Keterlibatan pada tahap perencanaan menyangkut keterlibatan dalam pengambilan keputusan atau pembuatan kebijakan. Keputusan tersebut menurut Cohen dan Uphoff, Mishra (1984) dan Slamet (1984)

dapat dibedakan atas keputusan dasar, keputusan yang sementara berlangsung dan keputusan operasional.

Keputusan dasar berkenaan dengan tahap identifikasi proyek (terhadap persiapan), keputusan yang sementara berlangsung berkenaan dengan lokasi proyek sesuai kebutuhan dan prioritas, redesain proyek, dan penetapan lokasi proyek sesuai perkembangan lokal, keputusan operasional berkenaan dengan penetapan kriteria pelaksanaan, pemilihan pemimpin kegiatan tertentu, penentuan cara – cara pelaksanaan secara teknis dan kegiatan teknis lainnya.

2. Peran Serta pada Tahap Pelaksanaan

Ada beberapa cara masyarakat desa untuk terlibat dalam implementasi kegiatan pembangunan, Menurut Mishra (1984) serta Cohen dan Uphoff (1977) cara – cara tersebut adalah :

- a. Keterlibatan melalui kontribusi sumber – sumber yang dibutuhkan oleh program pembangunan, yang dapat berupa penyediaan tenaga kerja, material/benda, dan informasi yang dibutuhkan.
- b. Keterlibatan melalui usaha – usaha administrasi dan koordinasi, yaitu berupa pendataan kegiatan dan kemajuannya, melakukan

kontak langsung dengan unsur – unsur terkait, ataupun menjadi anggota dewan penasehat atau pengambil keputusan.

3. Peran Serta pada Tahap Pemanfaatan

Menurut Goldsmith dan Bulstain, dalam Jahi (1988) apabila dalam keterlibatan itu memberi manfaat dan dengan kemanfaatan itu dapat memenuhi keperluan – keperluan masyarakat setempat, maka hal ini akan menjadi faktor pendorong timbulnya kemauan masyarakat untuk ikut serta dalam proses pembangunan.

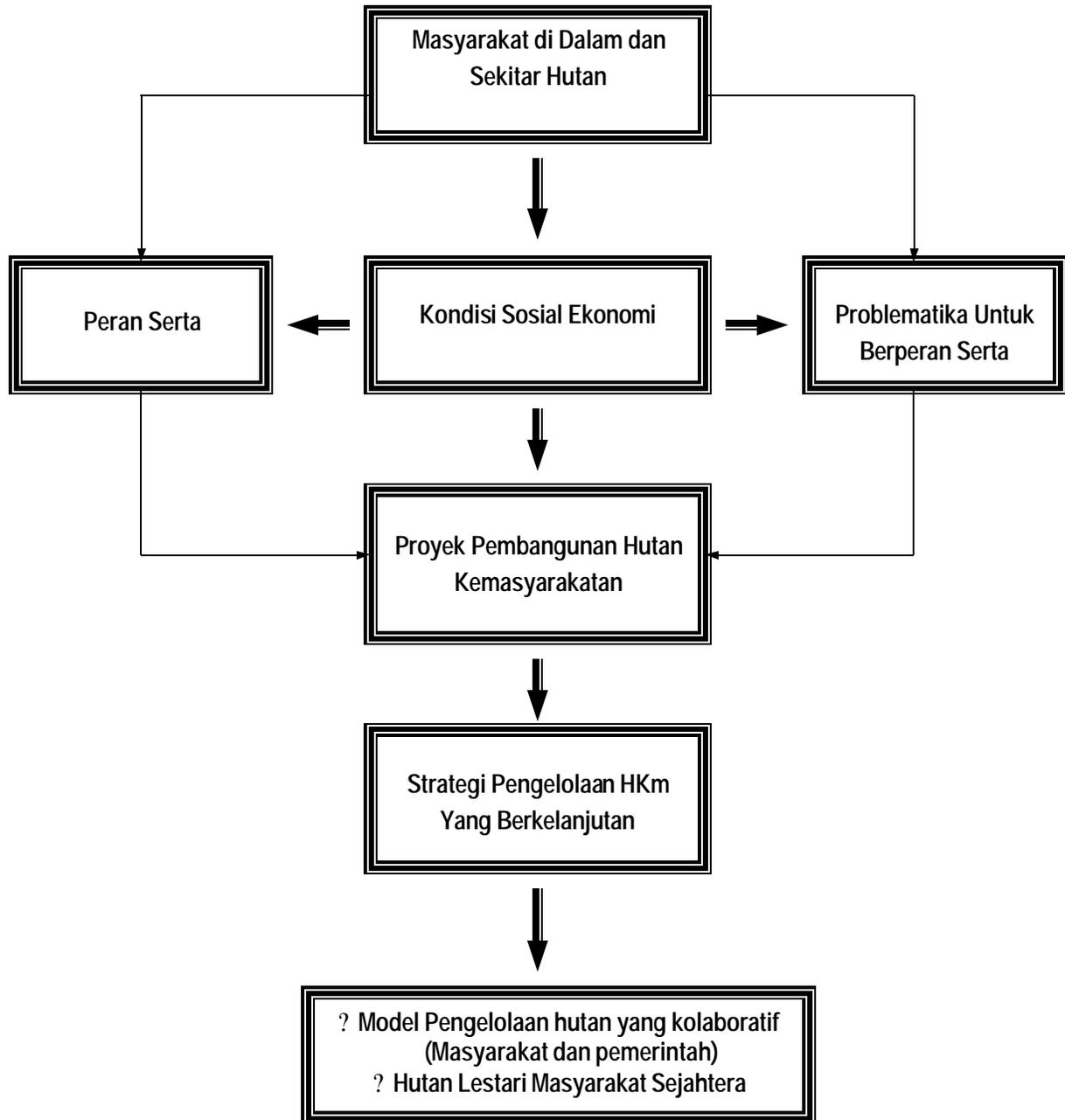
Berbagai macam manfaat yang dapat diperoleh masyarakat dari peran sertanya dalam pembangunan, dapat berbentuk material, sosial dan personal. Manfaat material meyangkut barang – barang pribadi, misalnya konsumsi, pendapatan dan asset. Peningkatan konsumsi dapat terjadi apabila diikuti dengan peningkatan hasil. Peningkatan pendapatan dapat tercipta apabila terjadi peningkatan produksi dan peningkatan asset dapat terjadi jika pemilikan lahan dan lain – lain.

4. Peran Serta pada Tahap Penilaian Hasil Pembangunan

Penilaian hasil biasanya dilakukan melalui kegiatan utama, yaitu pemantauan dan evaluasi. Pemantauan adalah pengumpulan informasi secara terus menerus dalam input program, sasaran, kondisi dan

aktivitas program serta dampaknya. Tujuannya adalah untuk mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan yang mempengaruhi keberhasilan program.

KERANGKA PIKIR



Gambar 1. Kerangka Pikir

G. Hipotesis

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah :

- 1) Peran serta masyarakat dalam pembangunan HKm di Kabupaten Jeneponto masih rendah.
- 2) Strategi pengelolaan HKm agar tetap berkelanjutan, dengan mengembangkan model – model pengelolaan hutan *kolaboratif* antara pemerintah dan masyarakat, serta menempatkan masyarakat sebagai pemeran utama.